

Paradoks Kekuasaan: Analisis Kriminologis Kepemimpinan Jokowi

¹Maria Athena Gani, ²Raja Farras Nasution, ³Natanael, ⁴Pietro Grassio Eko Yulio, ⁵Victoria Kimberly, ⁶Alunuah Yogeta
¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Lippo Village, Tangerang

E-mail: 101051220168@uph.edu, 201051220161@uph.edu, 301051220157@uph.edu,
4pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu, 501051220191@student.uph.edu,
601050115@student.uph.edu

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji evolusi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui lensa kriminologis, dengan menyoroti bagaimana dinamika kekuasaan memaksa pemimpin untuk berkompromi antara idealisme reformis dan realitas struktural. Menggunakan kerangka *welfare state criminology*, Teori Kontrol Sosial, Teori Asosiasi Diferensial, dan Teori Strain, studi ini mengungkap bahwa tekanan sistemik dan jaringan politik yang mapan secara bertahap mengikis prinsip-prinsip transparansi dan anti-korupsi yang awalnya diusung Jokowi. Analisis menunjukkan bahwa melalui manipulasi kebijakan, penunjukan dinasti, dan pengalihan sumber daya negara menuju proyek mega-infrastruktur, seperti pembangunan ibu kota baru dan kereta cepat, terjadi degradasi fungsi dasar *welfare state*. Hal ini berdampak pada peningkatan ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Temuan penelitian ini menekankan perlunya penguatan mekanisme checks and balances, terutama dalam menjaga independensi kelembagaan, guna mencegah transformasi pemimpin visioner menjadi insider politik yang semata-mata bertahan demi kekuasaan.

Kata kunci : Kepemimpinan Jokowi, Kriminologi Politik, *Welfare State*, Teori Kontrol Sosial, Teori Asosiasi Diferensial, Teori Strain

ABSTRACT

This study examines the evolution of President Joko Widodo's (Jokowi) leadership through a criminological lens, highlighting how the dynamics of power force leaders to compromise between reformist ideals and entrenched structural realities. Utilizing frameworks such as welfare state criminology, Social Control Theory, Differential Association Theory, and Strain Theory, the research reveals that systemic pressures and established political networks gradually erode the transparency and anti-corruption principles initially championed by Jokowi. The analysis shows that through policy manipulation, dynastic appointments, and the diversion of state resources towards mega infrastructure projects—such as the development of a new capital and high-speed rail—there has been a degradation of the fundamental functions of the welfare state. This, in turn, contributes to increased economic disparities and social instability. The findings underscore the necessity of reinforcing institutional checks and balances, particularly by safeguarding judicial independence, to prevent visionary leaders from transforming into political insiders solely driven by the need for power survival.

Keyword : Jokowi's Leadership, Political Criminology, *Welfare State*, Social Control Theory, Differential Association Theory, Strain Theory

1. PENDAHULUAN

Joko Widodo atau yang lebih dikenal sebagai Jokowi, merupakan Presiden ketujuh Republik Indonesia sekaligus contoh menarik dari paradoks kekuasaan. Beliau hadir sebagai figur pembaharu dengan komitmen terhadap transparansi, pemberdayaan masyarakat, serta upaya membebaskan politik nasional dari hegemoni elite tradisional. Latar belakangnya yang sederhana, dimulai dari dunia usaha hingga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, memberikan resonansi kuat bagi masyarakat yang merindukan perubahan. Namun, ketika menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan, Jokowi dihadapkan pada kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan yang sebelumnya berupaya ia lawan justru semakin menunjukkan dominasi, sehingga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara idealisme dan batasan struktural dalam sistem pemerintahan.

Kekuasaan kerap dianggap sebagai instrumen perubahan, sebuah alat bagi pemimpin untuk mereformasi sistem yang telah lama berkarat. Namun, di balik narasi heroik seorang pemimpin yang ingin membangun tatanan baru, ada realitas yang jauh lebih kompleks: kekuasaan bukan hanya alat perubahan, tetapi juga belenggu yang mengikat. Penelitian ini menggali bagaimana tekanan struktural dan sistemik mampu mengikis idealisme bahkan dari pemimpin yang paling reformis sekalipun. Dengan menggunakan perspektif kriminologi yaitu Teori Asosiasi Diferensial, Teori Kontrol Sosial, Teori Ketegangan, dan Kriminologi Negara Kesejahteraan.

Studi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Institusi, jaringan politik, dan norma sosial membentuk medan tarik-ulur yang dapat mengubah seorang visioner menjadi bagian dari sistem yang sebelumnya ia coba dobrak.

Joko Widodo adalah contoh konkret dari paradoks kekuasaan ini. Ia memulai perjalanan politiknya dengan gagasan yang segar dan progresif: merangkul rakyat, membangun sistem yang lebih transparan, serta menyalakan harapan baru bagi kaum marjinal. Di awal pemerintahannya, kita menyaksikan seorang

pemimpin yang turun ke lapangan, mengunjungi desa-desa terpencil, dan mendigitalisasi birokrasi demi menekan korupsi. Kantornya bergemuruh dengan semangat reformasi, dengan kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk meretas ketimpangan dan memberi akses yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.

Namun, seiring bertambahnya masa kekuasaan, lanskap politik yang ia hadapi berubah, dan begitu pula dirinya. Dari seorang reformis yang menantang oligarki, ia perlahan masuk ke dalam pusaran kompromi politik yang semakin erat. Agenda-agenda yang dulu berorientasi pada keterbukaan dan keberpihakan kepada rakyat kecil mulai bergeser menjadi strategi bertahan dalam konstelasi kekuasaan yang diwarnai oleh kepentingan elite. Aliansi dengan dinasti politik dan aktor-aktor berpengaruh menjadi tak terhindarkan, sementara kebijakan yang dulunya radikal berubah menjadi lebih moderat—bukan karena kehilangan visi, tetapi karena kenyataan politik yang menuntut keluwesan. Transformasi ini bukan sekadar kisah tentang seorang pemimpin yang meninggalkan idealismenya, melainkan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana sistem bekerja. Kekuasaan bukan hanya soal memimpin, tetapi juga tentang menavigasi struktur yang telah mengakar. Dalam setiap langkahnya, seorang pemimpin harus menimbang antara visi jangka panjang dengan tekanan realitas politik yang menghendaki stabilitas. Dalam kasus Jokowi, proses ini berjalan secara bertahap—dari optimisme yang membara menjadi kompromi yang berlapis-lapis, dari revolusi yang lantang menjadi diplomasi yang hati-hati.

Pendekatan kriminologis terhadap fenomena ini membuka pemahaman yang lebih dalam mengenai relasi antara individu dan sistem. Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan bahwa perilaku dan cara berpikir seseorang dibentuk oleh lingkungan sosialnya, yang dalam konteks politik berarti bahwa seorang pemimpin reformis pun tidak kebal terhadap pengaruh elite yang mengelilinginya. Teori Kontrol Sosial menunjukkan bagaimana ekspektasi dan tekanan dari sistem yang lebih besar dapat membentuk perilaku pemimpin, memaksanya untuk menyesuaikan diri demi menjaga stabilitas politik. Sementara itu,

Teori Ketegangan menawarkan perspektif tentang bagaimana tekanan sistemik dapat memaksa seorang pemimpin mengorbankan prinsip-prinsip awalnya, dan Kriminologi Negara Kesejahteraan mengungkap bagaimana kebijakan yang awalnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dapat bergeser menjadi mekanisme kontrol sosial demi mempertahankan status quo (Santoso & Zulfa, 2001).

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland, 1947)

Diperkenalkan oleh Edwin Sutherland, teori ini menyatakan bahwa perilaku—termasuk perilaku menyimpang—dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Menurut Sutherland, individu tidak mewarisi kecenderungan kriminal secara genetik, melainkan memperoleh motif, teknik, dan rasionalisasi untuk tindakan menyimpang melalui asosiasi dengan kelompok yang mendukung perilaku tersebut. Dalam konteks kepemimpinan, teori ini mengindikasikan bahwa pemimpin akan menginternalisasi norma dan praktik yang berlaku dalam jaringan politik yang mereka masuki, yang dapat menggeser nilai-nilai reformis yang awalnya mereka anut.

2.2 Teori Kontrol Sosial (Hirschi, 1969)

Dikembangkan oleh Travis Hirschi, Teori Kontrol Sosial menekankan bahwa individu terikat kepada lingkungan sosialnya melalui hubungan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan berperan penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Hirschi berargumen bahwa semakin kuat ikatan sosial seseorang, maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut menyimpang dari norma sosial. Dalam ranah politik, teori ini menjelaskan mengapa pemimpin, meskipun awalnya mengusung agenda reformis, akhirnya cenderung mengikuti norma dan ekspektasi sistem yang telah mapan demi menjaga stabilitas politik dan kelangsungan kekuasaan.

2.3 Teori Strain dan General Strain Theory (GST) (Merton, 1938; Agnew, 1992)

2.3.1 Teori Strain Klasik (Merton, 1938)

Diperkenalkan oleh Robert Merton, teori ini menjelaskan bahwa tekanan (*strain*) muncul ketika individu tidak mampu mencapai tujuan yang bernilai positif melalui cara-cara yang sah. Ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan dan kesempatan untuk mencapainya, individu dapat merespons dengan cara yang menyimpang atau adaptif. Dalam konteks kepemimpinan, tekanan struktural dan politik dapat mendorong pemimpin untuk mengubah atau mengorbankan idealisme awalnya.

2.3.2 General Strain Theory (GST) (Agnew, 1992)

Dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Agnew, GST memperluas konsep strain dengan memasukkan faktor stres psikologis, rangsangan negatif, dan hilangnya stimulus positif sebagai pemicu perilaku menyimpang. Agnew berpendapat bahwa individu dapat mengembangkan strategi koping—baik yang adaptif maupun menyimpang—sebagai respons terhadap tekanan sosial dan psikologis yang lebih luas. Dalam studi kepemimpinan, GST membantu menjelaskan bagaimana tekanan dari sistem politik yang keras dapat memaksa pemimpin untuk menyimpang dari prinsip reformis demi menjaga stabilitas dan kelangsungan pemerintahan. (Agnew, 1992)

2.4 Kriminologi Welfare State (Pierson, 2009)

Kerangka *welfare state criminology* berangkat dari premis bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan kesejahteraan melalui distribusi sumber daya yang adil dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Peneliti seperti Pierson (2009) menekankan bahwa kegagalan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dapat menyebabkan disorganisasi sosial, yang kemudian menciptakan kondisi kondusif bagi munculnya perilaku kriminal dan ketidakstabilan masyarakat. Dalam konteks politik, manipulasi sumber daya untuk mendukung ambisi dinastis dan proyek-proyek mega infrastruktur dapat mengikis dasar-dasar *welfare state*, yang pada akhirnya meningkatkan ketimpangan ekonomi dan ketegangan sosial.

2.5 Kriminologi Postmodern (Milovanovic, 1997)

Teori kriminologi postmodern, diilhamkan oleh pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Dagan Milovanovic, menekankan bagaimana gangguan kecil dalam sistem politik dapat memicu perubahan struktural besar melalui efek domino. Pendekatan ini melihat bahwa pilihan-pilihan strategis dan manuver kelembagaan—meskipun tampak minor—dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan integritas negara, khususnya dalam konteks erosi fungsi *welfare state* dan konsolidasi kekuasaan dinasti.

3. METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang terjadi dalam konteks yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta (jika relevan) wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara tematik guna menemukan pola dan hubungan yang mendasari fenomena tersebut. Proses validasi temuan dilakukan dengan cara triangulasi data dan diskusi bersama para ahli, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan (Sahetapy, 2005).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar-Dasar Kriminologis dari Pembatasan Kepemimpinan: Kebangkitan Jokowi yang Tidak Konvensional, Dari Outsider Menjadi Insider

Kepemimpinan sering kali dipandang sebagai ekspresi dari visi dan karakter individu. Tetapi dalam kenyataannya, ia dibentuk oleh struktur kekuasaan yang lebih besar. Joko Widodo (Jokowi) merupakan contoh menarik dari bagaimana seorang outsider alias tokoh di luar lingkaran elite politik tradisional dapat menembus tatanan politik yang telah lama

mengakar. Namun, perjalanannya juga mencerminkan dilema mendasar dalam sistem politik: sejauh mana seorang pemimpin dapat bertahan dengan idealismenya sebelum akhirnya terserap ke dalam mekanisme kekuasaan yang ia coba ubah (Arrigo & Williams, n.d.).

Dari perspektif kriminologi politik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Pelabelan, yang menyoroiti bagaimana individu di luar sistem kekuasaan sering kali dicurigai dan mengalami resistensi saat mencoba memperoleh legitimasi. Status outsider yang disematkan pada Jokowi sejak awal karier politiknya bukan sekadar deskripsi, tetapi juga sebuah hambatan struktural yang membatasi ruang gerak dalam lanskap politik Indonesia.

Jokowi lahir di kota kecil di Jawa Tengah, jauh dari orbit kekuasaan yang biasanya melahirkan pemimpin nasional di Indonesia. Tidak seperti pendahulunya yang berasal dari latar belakang militer atau dinasti politik, Jokowi menghabiskan masa kecilnya dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, tinggal di tepi sungai dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Pengalaman ini membentuk kedekatannya dengan rakyat kecil serta mengasah empatinya terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pada umumnya.

Kariernya bermula sebagai pengusaha furnitur, sebuah sektor yang menuntut ketekunan serta pemahaman mendalam tentang dinamika ekonomi riil. Perjalanan ini bukan sekadar membangun kredibilitasnya sebagai pemimpin yang memahami perjuangan rakyat, tetapi juga membentuk etos politik yang berbasis pada pragmatisme dan keterjangkauan. Saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia menegaskan pendekatan tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat, mulai dari relokasi pedagang kaki lima hingga peningkatan layanan publik yang transparan.

Keberhasilan di Solo menjadi batu loncatan bagi Jokowi untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, pertama sebagai Gubernur Jakarta, lalu sebagai Presiden Indonesia. Namun, seiring dengan kenaikan posisinya dalam hierarki politik, tantangan yang dihadapinya pun semakin kompleks. Jika di Solo ia dapat mengandalkan popularitasnya di tingkat lokal, maka di

Jakarta dan tingkat nasional, ia harus menghadapi realitas politik yang jauh lebih keras: jaringan oligarki, kepentingan elite, serta struktur patronase yang telah lama mengakar.

Bagi elite politik yang terbiasa dengan pola kepemimpinan konvensional, Jokowi adalah anomali. Kenaikannya yang cepat dan tidak biasa disambut dengan skeptisisme dan resistensi. Ia dicap sebagai pemimpin yang kurang berpengalaman dan dinilai tidak memiliki fondasi politik yang cukup kuat untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Pada titik ini, statusnya sebagai outsider justru menjadi kelemahan, karena tanpa dukungan kuat dari elite politik, ia menghadapi kesulitan dalam menavigasi sistem yang didominasi oleh kepentingan kelompok berpengaruh.

Seiring berjalannya waktu, realitas politik memaksanya untuk melakukan serangkaian kompromi. Demi menjaga stabilitas pemerintahannya, ia harus membangun aliansi dengan kekuatan-kekuatan yang sebelumnya ia lawan. Ini mencerminkan bagaimana sistem politik bekerja: seorang reformis yang berupaya mengubah tatanan lama sering kali harus beradaptasi dengan mekanisme yang sudah ada agar tetap bertahan.

Dalam perkembangannya, citra Jokowi sebagai outsider perlahan-lahan memudar. Keputusan-keputusan politiknya semakin menunjukkan orientasi pada kontinuitas daripada perubahan radikal yang dulu ia usung. Faktor utama yang mempercepat transisi ini adalah munculnya figur-figur seperti Prabowo Subianto, yang pada awalnya menjadi rival politiknya, tetapi kemudian bertransformasi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Selain itu, keterlibatan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam politik nasional juga semakin memperkuat persepsi bahwa Jokowi kini bukan lagi sosok di luar sistem, melainkan bagian dari struktur yang ia coba tantang di awal kepemimpinannya.

Ironisnya, perjalanan politiknya telah bergerak dalam satu lingkaran penuh: dari seorang reformis yang menentang politik dinasti, ia kini berada dalam posisi di mana praktik politik berbasis patronase menjadi bagian dari strategi bertahannya. Keputusan-keputusan yang diambilnya dalam beberapa tahun terakhir

mencerminkan pergeseran dari visi transformasi menuju kebijakan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas.

Singkatnya, status *outsider* Jokowi merupakan sumber kekuatan politiknya sekaligus faktor yang menyebabkan ia harus melakukan kompromi yang tak terhindarkan. Perjalanan dari latar belakang desa yang sederhana hingga ke puncak kekuasaan politik menggambarkan tantangan inheren dalam mempertahankan idealisme reformis di dalam sistem yang telah mapan, yang pada akhirnya menyoroti interaksi kompleks antara keyakinan pribadi dan keterbatasan sistemik dalam politik kontemporer

4.2 Teori Asosiasi Diferensial: Belajar Kepemimpinan Melalui Jaringan Politik

Secara mendasar, kriminologi mengeksplorasi alasan-alasan di balik perilaku manusia, yang dapat diterapkan dalam analisis kepemimpinan politik. Para pemimpin, meskipun di depan publik menampilkan citra pengendalian diri, sering kali terikat oleh ekspektasi sistem, pendukung, dan struktur yang menopang stabilitas politik. Dalam konteks ini, perjalanan politik Joko Widodo (Jokowi) mencerminkan dinamika kompleks yang terjadi dalam ranah kekuasaan. Awalnya dipuji karena semangat reformis dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, Jokowi kini mendapati dirinya terjebak dalam sistem yang dulu ia kritik. Kepopulerannya yang semakin meningkat menghadirkan ironi besar: seorang pemimpin yang sebelumnya menggerakkan massa untuk menantang oligarki kini justru diharuskan mempertahankan citra kejujuran sambil melakukan langkah-langkah pragmatis yang dulu ia kecam.

Disonansi internal ini menyoroti gagasan utama dalam analisis kriminologi, yakni bahwa tidak hanya tindakan kepemimpinan yang perlu dikaji, tetapi juga kekuatan sistemik dan tekanan eksternal yang membentuk perilaku pemimpin. Dari seorang aktivis grassroot hingga menjadi seorang insider yang pragmatis, citra politik Jokowi mencerminkan fenomena lebih luas di mana kebutuhan untuk bertahan dalam politik secara progresif mengikis idealisme awal. Sesuai dengan Teori Asosiasi Diferensial yang dikembangkan oleh Edwin

Sutherland, tindakan dan standar seorang pemimpin berubah seiring dengan keterlibatannya dalam struktur kekuasaan, sehingga ia mengadopsi praktik-praktik yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai awalnya.

Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Dalam perspektif ini, perilaku kriminal bukanlah bawaan, melainkan diperoleh melalui lingkungan sosial, terutama melalui hubungan dekat (Artamevia & Zaky, 2021). Teori ini menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga motif, rasionalisasi, dan sikap yang membenarkan tindakan tertentu. Faktor seperti frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas hubungan sosial seseorang berkontribusi pada internalisasi norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompoknya. Sebagai contoh, seseorang yang terus-menerus berinteraksi dengan kelompok yang terbiasa melakukan praktik korupsi lebih mungkin mengadopsi perilaku serupa. Dengan demikian, teori ini menyoroti bagaimana proses sosial membentuk tindakan individu, termasuk dalam konteks kepemimpinan politik.

Dalam politik, pemimpin selalu dipengaruhi oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Keputusan mereka tidak hanya dipengaruhi oleh visi pribadi tetapi juga oleh ekspektasi pemangku kepentingan, aliansi politik, serta batasan institusional yang menentukan apa yang dapat dilakukan. Perjalanan Jokowi menunjukkan bagaimana seorang outsider yang awalnya dimotivasi oleh semangat reformis perlahan menyesuaikan diri dengan dinamika kekuasaan yang telah mengakar demi menjaga stabilitas pemerintahan. Elit politik, penasihat, dan kelompok kepentingan yang berinteraksi dengannya turut membentuk kebijakan serta arah politik yang ia tempuh.

Sebagai seorang outsider, Jokowi membangun reputasinya melalui kepemimpinan grassroot. Latar belakangnya sebagai anak seorang pedagang kayu dari kota kecil di Jawa Tengah membedakannya dari banyak elit politik Indonesia yang berasal dari keluarga berpengaruh. Kariernya dimulai dari Wali Kota Solo, di mana ia dikenal karena pendekatan langsung dengan

rakyat dan komitmennya terhadap transparansi serta pemberantasan korupsi. Keberhasilannya kemudian membawanya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya Presiden RI. Popularitasnya didorong oleh gerakan rakyat yang selama ini merasa terpinggirkan oleh sistem politik yang oligarkis. Para pendukung awalnya melihatnya sebagai pemimpin yang dapat menantang status quo dan membawa perubahan mendasar.

Namun, seiring kenaikan karier politiknya, Jokowi semakin dikelilingi oleh jaringan politisi berpengalaman dan makelar kekuasaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai kendaraan politik utamanya, memainkan peran besar dalam membentuk langkah-langkah politiknya. Menurut Teori Asosiasi Diferensial, interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok yang memiliki kekuasaan akan membuat seseorang menginternalisasi norma dan praktik yang berlaku dalam kelompok tersebut. Dalam kasus Jokowi, keterlibatan yang semakin erat dengan elit mapan menempatkannya dalam situasi di mana kompromi dan pragmatisme menjadi bagian dari realitas politik.

Perubahan ini terlihat dalam prioritas kebijakan serta pengambilan keputusannya. Semakin lama ia berada dalam sistem, semakin besar pula pengaruh yang diberikan oleh para aktor politik yang telah lama berkuasa. Hal ini menyebabkan pergeseran dari seorang pemimpin reformis yang independen menjadi seorang pemimpin yang harus menyesuaikan diri dengan norma politik yang ada. Proses ini menggambarkan bagaimana teori Sutherland dapat menjelaskan perubahan perilaku seorang pemimpin dalam konteks politik, di mana jaringan sosial memiliki dampak besar terhadap evolusi sikap dan kebijakan seseorang.

4.3 Teori Kontrol Sosial: Kepemimpinan sebagai Kekuatan Pembatas

Travis Hirschi dalam *Social Control Theory*, mengemukakan bahwa kepatuhan individu terhadap norma sosial tidak lahir dari moralitas intrinsik semata, melainkan dari keterikatan sosial yang mengekang kecenderungan alami manusia terhadap perilaku menyimpang (Hirschi,

1969). Dalam kerangka kepemimpinan politik, teori ini memberikan perspektif kritis terhadap fenomena di mana pemimpin reformis, yang pada awalnya berupaya mendobrak status quo, justru pada akhirnya terserap ke dalam sistem yang mereka kritik. Resistensi terhadap tatanan yang telah mengakar bukan hanya menghadapkan mereka pada tantangan struktural, tetapi juga ancaman terhadap kelangsungan kekuasaan mereka sendiri.

Niccolò Machiavelli dalam *The Prince* secara eksplisit menyoroti peran lingkungan politik dalam membentuk kebijakan seorang pemimpin. Ia menegaskan bahwa kualitas seorang penguasa dapat diukur dari kapasitasnya dalam memilih lingkaran dalamnya, apakah mereka terdiri dari individu yang kompeten dan loyal atau sekadar oportunist yang mempertahankan status quo. Senada dengan itu, Max Weber dalam *Politik als Beruf* menyoroti dilema mendasar seorang pemimpin antara mempertahankan idealisme normatif atau berkompromi dengan realitas politik demi efektivitas kepemimpinan. Keduanya menegaskan bahwa politik, pada akhirnya, menuntut negosiasi yang kompleks antara prinsip dan pragmatisme.

Lintasan kepemimpinan Joko Widodo merefleksikan dinamika tersebut dengan jelas. Awalnya, ia tampil sebagai sosok populis yang mengusung semangat reformasi, memperjuangkan transparansi dan pemberantasan korupsi, serta mendekatkan diri pada kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, dalam perjalanannya, kompromi politik menjadi keniscayaan. Ketika tekanan dari oligarki politik dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan meningkat, ia pun secara gradual bergeser ke arah pragmatisme yang lebih konformis, bahkan dalam beberapa aspek terjebak dalam patronase kekuasaan yang selama ini ia kritik.

Teori Ikatan Sosial Hirschi mengidentifikasi empat elemen utama yang mencegah individu menyimpang dari norma, yaitu keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*). Jika diaplikasikan dalam analisis kepemimpinan, keempat aspek ini menjelaskan transformasi politik Jokowi (Hirschi, 1969):

4.3.1 Keterikatan

Sejak awal, Jokowi membangun basis keterikatan yang kuat dengan masyarakat akar rumput, kelompok sipil, dan kelas pekerja yang menganggapnya sebagai antitesis elite politik tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, keterikatan ini berangsur bergeser ke arah kelompok oligarki dan elite politik mapan, yang secara inheren memiliki ekspektasi dan tuntutan yang berbeda terhadap dirinya

4.3.2 Komitmen

Komitmen awal Jokowi terhadap kebijakan-kebijakan progresif, seperti pemberantasan korupsi dan deregulasi ekonomi, pada akhirnya menghadapi ujian ketika stabilitas politik dan kesinambungan kekuasaan menjadi prioritas. Untuk mempertahankan aliansi strategis, ia harus menavigasi lanskap oligarkis yang menuntut konsesi, sehingga mengikis sebagian dari agenda reformisnya.

4.3.3 Keterlibatan

Semakin dalam pemerintahannya terlibat dengan jejaring elite yang telah lama menguasai politik Indonesia, semakin berkurang intensitas keterlibatan langsungnya dalam agenda-agenda reformasi yang dahulu menjadi ciri khasnya. Fokus kebijakannya bergeser dari terobosan struktural menuju strategi konsolidasi kekuasaan, di mana stabilitas politik lebih diutamakan ketimbang inovasi kebijakan yang berisiko mengguncang sistem.

4.3.4 Keyakinan

Pada awalnya, Jokowi mengusung nilai-nilai antikorupsi dan meritokrasi sebagai pilar kepemimpinannya. Namun, realitas politik menuntutnya untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, yang sering kali bertentangan dengan idealisme awalnya. Toleransinya terhadap praktik nepotisme dan konsolidasi dinasti politik menjadi indikasi bahwa keyakinan ideologisnya mengalami transformasi yang signifikan, dari moralitas politik menuju kalkulasi strategis.

Lebih jauh, jika ditinjau melalui perspektif *Differential Association Theory*, perubahan Jokowi mencerminkan proses internalisasi nilai dan praktik dari kelompok

sosial yang mendominasi sistem kekuasaan. Edwin Sutherland menegaskan bahwa individu tidak berperilaku menyimpang dalam ruang hampa; mereka mempelajari dan mengadopsi pola tindakan melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Dalam hal ini, Jokowi yang awalnya merupakan outsider politik perlahan menyerap dan mereplikasi pola patronase, konsensus oligarkis, serta manuver politik yang telah lama menjadi karakteristik dominan dalam struktur kekuasaan di Indonesia.

Pada akhirnya, transformasi kepemimpinan Jokowi bukan sekadar persoalan personal, melainkan cerminan dari dinamika struktural yang mengatur politik di Indonesia. Ia menghadapi paradoks yang sama seperti banyak pemimpin reformis lainnya: antara mempertahankan idealisme atau menyesuaikan diri dengan realitas politik yang sarat kompromi. Sejarah menunjukkan bahwa sangat sedikit pemimpin yang mampu menghindari jebakan sistemik ini, dan Jokowi bukanlah pengecualian.

4.4 Teori Strain dan Beban Kepemimpinan: Di Balik Evolusi Politik Jokowi (Merton, 1938; Agnew, 1992)

Teori Strain yang diperkenalkan oleh Robert Merton (Merton, 1938) mengkaji bagaimana individu merespons tekanan sosial ketika mereka menghadapi keterbatasan dalam mencapai tujuan melalui cara-cara yang sah. Dalam kepemimpinan Joko Widodo, tekanan politik yang muncul dari sistem elit yang telah mengakar di Indonesia menciptakan dilema antara reformasi dan kelangsungan kekuasaan. Manipulasi terhadap kerangka hukum, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan penunjukan anggota keluarga dalam posisi strategis, menunjukkan bagaimana tekanan politik dapat mendorong seorang pemimpin untuk melakukan kompromi yang sebelumnya ditentangnya.

General Strain Theory (GST) yang dikembangkan oleh Robert Agnew memperluas cakupan teori strain klasik dengan menyoroti faktor stres psikologis, rangsangan negatif, serta hilangnya

penguatan positif sebagai determinan utama perilaku adaptif atau menyimpang. Berbeda dengan teori Merton yang berfokus pada keterbatasan peluang ekonomi, Agnew menekankan bahwa tekanan sosial yang lebih luas dapat mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang tidak selalu selaras dengan idealisme awalnya.

Dalam kepemimpinan politik, tekanan tidak hanya berasal dari tantangan ekonomi tetapi juga dari ketegangan struktural dan institusional yang membentuk proses pengambilan keputusan. Seperti individu yang berusaha menavigasi tekanan sosial, seorang pemimpin harus menyeimbangkan antara idealisme dan realitas politik. Evolusi politik Jokowi dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan struktural, yang membawanya dari seorang reformis yang berada di luar sistem menuju figur pragmatis yang semakin terintegrasi dalam jaringan kekuasaan. Transformasi ini dapat dianalisis melalui tiga kategori strain menurut Agnew (Agnew, 1992):

a. Strain sebagai Kegagalan Mencapai Tujuan Bernilai Positif

Pada awal pemerintahannya, Jokowi hadir dengan agenda reformasi yang menekankan transparansi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Namun, resistensi dari oligarki politik, inefisiensi birokrasi, serta kepentingan kelompok mapan secara bertahap membatasi ruang gerak untuk mewujudkan agenda tersebut. Dalam perspektif Agnew, individu yang menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan cenderung mengubah ekspektasi mereka atau mencari jalur alternatif. Dalam kasus Jokowi, strategi adaptifnya tercermin dalam aliansinya dengan elit politik yang sebelumnya ia lawan. Keputusan ini bukan sekadar bentuk pengingkaran idealisme, melainkan respons terhadap tekanan politik yang mengharuskan kompromi demi mempertahankan stabilitas pemerintahan.

b. Strain sebagai Penghilangan Stimulus Positif

Jokowi awalnya dikenal sebagai pemimpin dengan gaya populis yang dekat dengan rakyat, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dan kebijakan kesejahteraan. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya lanskap politik,

keterlibatannya yang langsung dengan masyarakat berkurang, dan tim reformis yang mengawal kebijakan transformatifnya perlahan tergeser oleh kepentingan oligarki.

Dalam GST, kehilangan stimulus positif dapat menciptakan tekanan yang mendorong individu untuk menyesuaikan strategi mereka. Dalam kasus Jokowi, hilangnya momentum reformasi awal dan dominasi kepentingan politik pragmatis menciptakan pergeseran kebijakan yang lebih mengakomodasi status quo.

c. Strain sebagai Munculnya Stimulus Negatif

Sepanjang masa kepemimpinannya, Jokowi menghadapi tekanan konstan dari oposisi politik, kritik media, serta dinamika internal koalisi yang kerap menghambat inisiatif reformasinya. Dalam teori Agnew, stimulus negatif seperti ancaman, tekanan eksternal, dan perlawanan politik dapat memaksa individu untuk menempuh strategi koping yang bertujuan meredakan ketegangan. Dalam konteks Jokowi, respons adaptif ini terlihat dalam langkah-langkah strategisnya, seperti memanfaatkan instrumen hukum untuk memperkuat posisi politiknya, serta mengakomodasi praktik nepotisme yang secara pragmatis memperkuat loyalitas politik di lingkaran terdekatnya. Meskipun bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang diusungnya di awal, langkah-langkah ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas kekuasaan dalam menghadapi tekanan politik yang berkelanjutan.

GST menegaskan bahwa strain tidak selalu melahirkan perilaku menyimpang, tetapi sering kali mendorong berbagai bentuk adaptasi. Dalam kasus Jokowi, transformasi dari seorang reformis menjadi insider politik merupakan hasil dari navigasi kompleks terhadap tekanan struktural yang terus meningkat. Pergeseran ini bukan sekadar pengabaian terhadap prinsip awalnya, melainkan upaya rasional untuk menemukan keseimbangan antara idealisme dan realitas politik.

a. Dinamika Reformasi dan Pragmatisme

Pada fase awal kepemimpinan, Jokowi mengedepankan kebijakan reformis yang menargetkan penyederhanaan birokrasi dan pemberantasan korupsi. Namun, tantangan legislatif dan tekanan dari elit

politik mengarah pada pergeseran strategi, di mana reformasi radikal digantikan oleh pendekatan yang lebih pragmatis guna memastikan keberlanjutan pemerintahan.

b. Kelangsungan Politik sebagai Prioritas

Dalam ekosistem politik yang sarat dengan kompetisi dan manuver kekuasaan, kelangsungan politik menjadi pertimbangan utama. Ketergantungan Jokowi yang semakin besar pada jaringan politik mapan dan langkah-langkah strategis seperti rekayasa hukum bukan sekadar indikasi penyimpangan dari idealisme, tetapi juga strategi adaptasi terhadap tekanan institusional yang terus berkembang.

c. Menyelaraskan Idealism dan Realitas Politik

Sejalan dengan teori Agnew, strain dalam kepemimpinan politik tidak selalu mengarah pada penyimpangan, tetapi dapat melahirkan strategi koping yang beragam. Dalam kasus Jokowi, keputusan-keputusan politik yang diambil dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara prinsip reformasi awalnya dengan kebutuhan praktis untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Meskipun pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial tetap menjadi prioritas, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut semakin dipengaruhi oleh kalkulasi politik yang realistis dalam menghadapi tekanan dari struktur kekuasaan yang telah mapan.

4.5 Kriminologi *Welfare State*: Erosi Kesejahteraan Indonesia di Bawah Manuver Politik Jokowi

4.5.1 Konsep *Welfare State* dan Kritik terhadapnya

Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan konsep yang berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimal bagi warganya melalui penyediaan layanan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan lainnya. Secara ideal, negara harus menyediakan berbagai layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial guna mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kriminologi negara kesejahteraan, apabila fungsi-fungsi

ini terganggu, maka tekanan sosial yang muncul dapat menjadi faktor pemicu tindakan kriminal serta ketidakstabilan sosial.

Teori ini berpijak pada anggapan bahwa kegagalan negara dalam mendistribusikan sumber daya secara adil dapat menyebabkan disorganisasi sosial, yang berujung pada peningkatan potensi kriminalitas. Kelemahan dalam implementasi negara kesejahteraan diyakini memperburuk kesenjangan ekonomi, merusak layanan publik, serta semakin meminggirkan kelompok rentan dalam masyarakat. Pierson (2009) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial memiliki berbagai dimensi, mencakup kesejahteraan kolektif, kesejahteraan ekonomi melalui mekanisme pasar, serta kesejahteraan yang disediakan langsung oleh negara. Ketika salah satu dari unsur ini terganggu, maka struktur sosial yang menopang stabilitas masyarakat berisiko mengalami kemerosotan secara bertahap.

4.5.2 Penangkapan Negara dan Manuver Politik di Era Jokowi

Dalam konteks pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), strategi politik yang diterapkan, terutama dalam kaitannya dengan pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden, menunjukkan indikasi fenomena *state capture* atau penangkapan negara. Fenomena ini mengacu pada kondisi di mana aktor-aktor politik yang berkuasa memanfaatkan institusi hukum dan negara demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan demi kesejahteraan rakyat. Dengan memanfaatkan sumber daya negara guna mendukung kepentingan dinasti politik, pemerintahan Jokowi dinilai telah mengalihkan fokus dan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi program kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, prinsip dasar negara kesejahteraan tergerus, sebab kebijakan yang diambil lebih banyak diarahkan untuk memperkokoh kekuasaan politik dibandingkan untuk mendukung sektor vital seperti jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Salah satu contoh nyata dari praktik ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman, kakak ipar Jokowi, dalam merevisi batas usia calon

presiden dan wakil presiden. Perubahan ini memungkinkan Gibran memenuhi syarat dalam Pemilu 2024 meskipun minim pengalaman. Keputusan tersebut tidak sekadar menjadi interpretasi ulang konstitusi, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam sistem kelembagaan. Tindakan ini berpotensi mengancam independensi kehakiman serta membuka celah bagi reformasi hukum yang dilakukan secara sewenang-wenang, yang pada akhirnya dapat melemahkan demokrasi.

Pendekatan kriminologi postmodern yang dikembangkan oleh Dragan Milovanovic sangat relevan dalam membaca fenomena ini. Milovanovic menjelaskan bahwa dinamika politik yang tidak stabil serta manipulasi terhadap sistem hukum dapat menciptakan efek domino yang mengarah pada perubahan struktural yang besar. Melalui perspektif ini, langkah-langkah yang diambil oleh Anwar Usman dapat dipandang sebagai bagian dari tren yang lebih luas, yaitu meningkatnya ketidakstabilan serta melemahnya fungsi negara kesejahteraan.

Ketika sistem kelembagaan dimanipulasi untuk kepentingan politik dan dinasti, negara akan kehilangan kemampuannya dalam menyediakan layanan dasar yang esensial bagi masyarakat. Akibatnya, ketimpangan sosial-ekonomi akan semakin dalam, dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pun berpotensi menurun drastis. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, maka stabilitas negara kesejahteraan akan semakin rapuh, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kohesi sosial dalam jangka panjang.

4.5.3 Implikasi Ekonomi: Proyek Mega dan Misalokasi Sumber Daya

Faktor lain yang turut mempercepat erosi *welfare state* di Indonesia adalah kecenderungan negara untuk memprioritaskan proyek infrastruktur berskala besar dibandingkan dengan investasi dalam layanan sosial dasar. Anggaran publik terserap oleh proyek-proyek ambisius seperti pembangunan ibu kota baru (Ibu Kota Nusantara) dan sistem kereta cepat yang diklaim sebagai simbol kemajuan nasional (Damanhuri, 2000). Namun, dalam praktiknya, inisiatif-inisiatif ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite politik dan

ekonomi daripada menjawab kebutuhan fundamental masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai ilustrasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang awalnya dianggarkan sebesar USD 6 miliar mengalami eskalasi biaya hingga lebih dari USD 7,3 miliar, sebagian besar ditanggung oleh negara meskipun proyek ini mendapat investasi dari Tiongkok. Lonjakan biaya ini tidak hanya membebani anggaran negara tetapi juga mengalihkan alokasi dana dari sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, megaprojek IKN yang diproyeksikan menelan biaya lebih dari USD 32 miliar menimbulkan berbagai kekhawatiran, mulai dari sengketa lahan, dampak ekologis, hingga keberlanjutan fiskal, di saat permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kebijakan nasional.

Ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya ini mencerminkan pola *misallocation of resources* (Pierson, 2009), di mana dana publik dialokasikan untuk proyek-proyek jangka panjang berbiaya tinggi yang lebih bersifat prestisius ketimbang substantif. Implikasi dari realokasi ini tidak hanya mempersempit ruang fiskal negara dalam membiayai layanan sosial yang esensial, tetapi juga semakin memperlebar kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif *welfare state criminology*, kesenjangan yang semakin melebar ini berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan sosial dan, dalam jangka panjang, dapat menjadi faktor pemicu eskalasi kriminalitas serta instabilitas sosial.

5. KESIMPULAN

Analisis kepemimpinan Jokowi melalui berbagai kerangka kriminologis mengungkapkan benang merah transformasi, di mana perolehan kekuasaan secara tak terhindarkan membawa kompromi ideologis. Jokowi, yang awalnya bangkit sebagai *outsider* reformis dengan motivasi pemberdayaan kelompok masyarakat yang berada di lapisan paling bawah dan janji transparansi, menunjukkan perjalanan yang secara perlahan dibentuk oleh batasan

kelembagaan, pengaruh oligarki, dan jaringan politik mapan. Sementara Teori Kontrol Sosial menekankan bahwa kebutuhan untuk bertahan secara politik menuntut konformitas terhadap ekspektasi sistem, Teori Asosiasi Diferensial mengindikasikan bahwa para pemimpin belajar dan menginternalisasi norma-norma yang ada melalui interaksi yang terus-menerus dengan elit mapan. Teori Strain juga menunjukkan bahwa tuntutan iklim politik yang keras memaksa para pemimpin untuk menyimpang dari tujuan reformis awal mereka, biasanya dengan mengorbankan transformasi radikal demi stabilitas pragmatis.

Perubahan ini terlihat jelas melalui menurunnya *welfare state* di Indonesia. Kewajiban dasar negara, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, terabaikan ketika sumber daya negara dialihkan untuk mempertahankan kekuasaan dinasti dan mensubsidi proyek-proyek mega seperti ibu kota baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya memperlebar kesenjangan ekonomi tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial dan, pada akhirnya, meningkatkan tingkat kriminalitas. Dalam konteks ini, manuver hukum yang disengaja oleh individu seperti Anwar Usman, yang memungkinkan naiknya Gibran meskipun minim pengalaman, mencerminkan pola manipulasi kelembagaan yang lebih besar yang melemahkan secara perlahan integritas demokratis dan fungsi *welfare state*.

Implikasi utamanya jelas, siapapun yang berada pada posisi kekuasaan serupa dengan Jokowi kemungkinan besar akan mengalami transformasi yang tidak terhindarkan. Terbenam dalam jaringan kekuasaan dan tekanan sistemik yang berlimpah, esensi pemerintahan menghasilkan perubahan yang bertahap, hampir seperti takdir, dari ide-ide transformatif yang revolusioner menjadi penekanan pada stabilitas dan kelangsungan hidup. Dinamika ini tidak unik bagi Jokowi, melainkan merupakan sifat inheren dari sistem politik itu sendiri, yang menyoroti ketegangan abadi antara idealisme dan pragmatisme dalam tata kelola modern, fenomena yang ada untuk dianalisis oleh ilmu kriminologi.

Singkatnya, paradoks kekuasaan terungkap dengan jelas, seperti yang terlihat dalam evolusi Jokowi, kekuasaan secara inheren mengubah bahkan pemimpin yang berniat baik sekalipun menjadi arketipe elit politik itu sendiri. Pola ini menegaskan kembali judul analisis ini, "Paradoks Kekuasaan: Analisis Kriminologis Kepemimpinan Jokowi."

DAFTAR PUSTAKA

- Arrigo, B. A., & Williams, C. R. (Eds.). (n.d.). *Philosophy, crime, and criminology*. University of Illinois Press.
- Artamevia, D., & Zaky, M. (2021). Analisis terhadap pelaku kejahatan carding ditinjau menggunakan teori asosiasi diferensial. *Anomie*, 3(1), 31-43.
- Damanhuri, D. S. (2000). Dimensi ekonomi politik pemberdayaan ekonomi rakyat. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 15(1), 41-55.
- Davies, E. (2019, April 14). After reality check, Indonesia's 'new face' in politics seeks second term. *Reuters*. <https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1RQ01R0CATP>
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Sebuah analisis. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1498-1507.
- Grassio, P. E. Y. (2021). *Kajian welfare state mengenai kemiskinan sebagai pemicu kejahatan merupakan dampak dari tidak sejahteranya rakyat* (Tugas akhir). Universitas Indonesia.
- Guntara, D. (2018). Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif teori differential association. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Manullang, C. J. (2023). Analisis teori kriminologi strain dalam kasus balap liar. *UNES Law Review*, 5(4), 3708-3723.
- Milovanovic, D. (1997). *Postmodern criminology*. Garland Publishing Inc.
- Moh Hatta. (2009). *Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus*. Liberty.
- Sahetapy, J. E. (2005). *Pisau analisis kriminologi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku ajar kriminologi* (Cet. 1). PT Rajawali Buana Pusaka.
- Yilmaz, I., & Koca, G. (2015). General strain theory of delinquency: The developmental process of Robert Agnew's works from a historical perspective. *International Journal of Business and Social Science*, 6(11).